BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang

Setelah di bentuknya koordinator teknis pada tahun 1983 – 1987, Instansi ini sudah beberapa kali mengalami perubahan nama cabang Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Provinsi Riau pada tahun 1998-1999 di karenakan adanya kebijakan otonomi daerah maka dibentuklah Suku Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Provinsi Riau pada tahun 1999-2000 berubah menjadi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Batam tahun 2000-2008.

Pesatnya perkembangan kota Batam menuntut adanya penanganan khususnya terhadap beberapa bidang yang mengakibatkan terjadinya pemekaran dinas, yang salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam tahun 2008-2017.

Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam di dasari oleh peraturan otonomi daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lebaran Daerah Nomor 51) serta Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2012 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah KotaBatam kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No.10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah maka dibentuklah Dinas BinaMarga dan Sumber Daya Air Kota Batam.

1.2 Tujuan Proyek

Adapun tujuan proyek penataan jalan(pelebaran jalan) Simp. Kabil – Masjid raya batam centre (lanjutan) adalah:

1. Sebagai pengembangan wilayah dan sekitarnya dalam pemerataan Pembangunan
2. Membantu masyarakat dalam hal memperlancar arus lalu lintas sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat,

dengan lancarnya arus lalu lintas memberi efisiensi waktu yang sangat berarti.

3. Memberikan kontrobusi sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai sehingga memberi pelayanan yang optimal bagi pengguna jalan.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2016 tersebut, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air disusun sebagai berikut :

A. Kepala Dinas
B. Sekretariat
    1) Sub Bagian Perencanaan dan Program
    2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    3) Sub Bagian Keuangan
C. Bidang Bina Marga
    1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan atau Pelantar
    2) Seksi Jalan
    3) Seksi Jembatan dan Pelantar
D. Bidang Prasarana Sumber Daya Air
    1) Seksi Perencanaan Teknis Prasarana Sumber Daya Air
    2) Seksi Drainase dan Sungai
    3) Seksi Pantai dan Waduk
E. Bidang Peralatan dan Pengujian
    1) Seksi Operasional Alat Berat
    2) Seksi Pemeliharaan Alat
    3) Seksi Pengujian
F. Bidang Penerangan Jalan dan Umum
G. Unit Pelaksana Teknis

1.4 Struktur Organisasi Proyek

Dalam suatu proyek pasti memerlukan sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan tujuan untuk mewujudkan kelancaran dan terjaminnya

pelaksanaansuatu proyek. Struktur organisasi adalah suatu susunan ataupun hubungan antar komponen berbagai bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen- komponen yang terdapat dalam suatu organisasi memiliki ketergantungan(Suwinardi, 2014).

Struktur suatu organisasi merupakan bagian dari manajemen suatu proyek, dimana manajemen itu sendiri adalah suatu cara pengelolaan suatu kegiatan yang memiliki tujuan tertentu. Berikut adalah struktur organisasi dari proyek Preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Batas Kota Prabumulih – Simpang Belimbing – Muara Enim

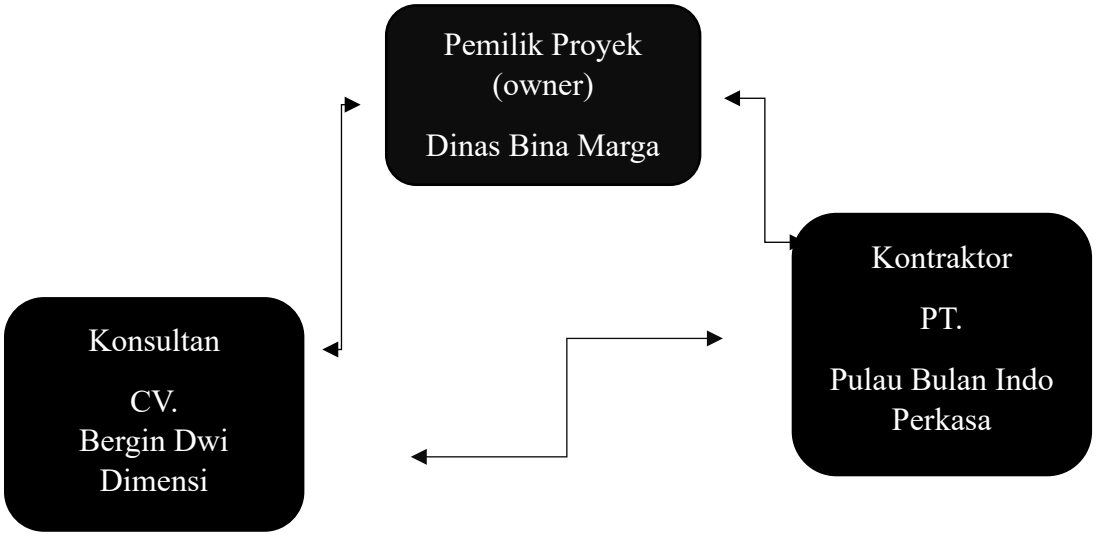

1.5 Struktur Organisasi Konsultan

Struktur organisasi pada proyek ini dipimpin oleh ketua divisi dan dikepalai oleh Project Manager yang bertugas untuk mengatur kegiatan pada proyek dan dibantu oleh kepala bagian. Kepala bagian pada proyek ini adalah Supervisi Engineer membawahi Quality Engineer, sementara inspector mengawasi pelaksana lapangan.

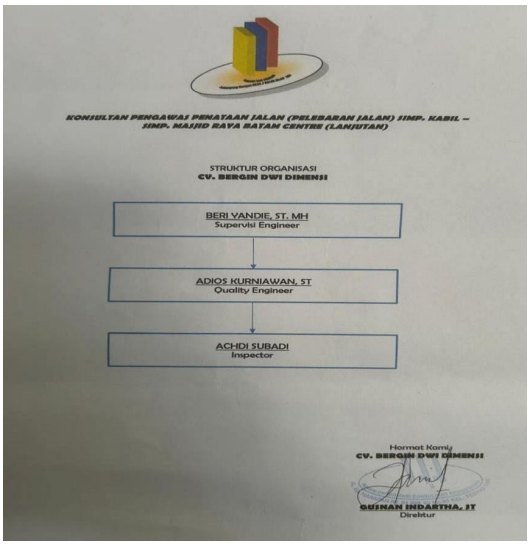

Berikut ini adalah penjelasan tugas dari tiap kepala yang ada pada Struktur Organisasi Konsultan Supervisi diatas:

1. Supervision Engginer

   Tugas dari Supervisor Engineer yaitu sebagai pimpinan tim konsultan di lokasi proyek yang bertanggung jawab kepada pimpinan proyek dimana timnya ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas pembantuan pengawas.

2. Quality Engineer

   Tugas dari Quality Engineer adalah melaksanakan pengawasan kualitas setiap hari termasuk mutu bahan untuk semua pelaksanaan pengujian pengendalian mutu dan menolak/menerima laporannya. Serta memberikan

laporan kepada supervision Engineer setiap permasalahan yang timbul dan usulan tindak lanjut dari setiap permasalahan. Bekerja sama dengan Quantity Engineer dalam menyesuaikan metode pelaksanaan di lapangan dengan di laboratorium. Melakukan analisis semua test material, termasuk usulan komposisi campuran (Job Mix Formula). Apabila diperlukan dapat melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengaturan dan pengadaan diasphalt mixing plan

3. Inspector

   Tugas dari Inspector mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan pekerja di lapangan yang sesuai dengan gambar kerja spesifikasi teknis. Menandatangani dan memeriksa permintaan izin kerja yang diajukan oleh kontraktor. Memeriksa dan menandatangani shop drawing dan as build drawing yang benar yang diajukan oleh kontraktor

1.6 Struktur Organisasi Kontraktor

Struktur organisasi pada proyek ini dikepalai oleh Manajer Pelaksanaan Proyek yang bertugas untuk mengatur kegiatan pada proyek dan dibantu oleh kepala bagian. Kepala bagian pada proyek ini adalah Menajer keuangan danadministrasi, Manajer Teknik dan petugas Ahli K3.

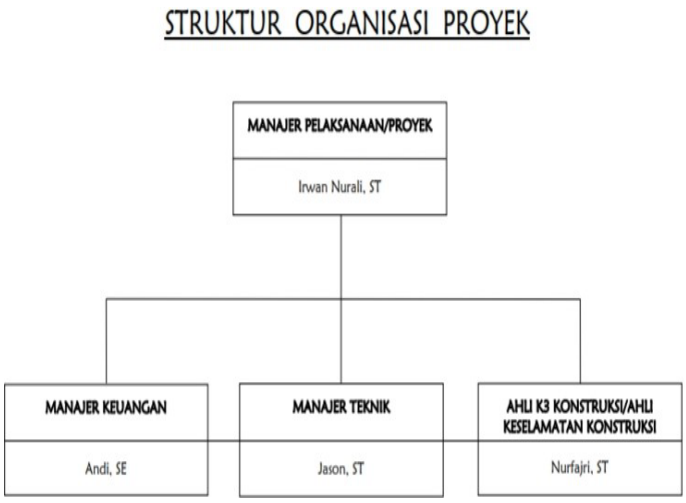

Berikut ini adalah penjelasan tugas dari tiap kepala yang ada pada Struktur Organisasi Proyek diatas:

1 Menajer Pelaksanaan Proyek

Tugas dari Menajer Pelaksanaan Proyek adalah memimpin dan mengendalikan kegiatan proyek agar efisien dan efektif mencapai hasil optimal dari segi kualitas dan pencapaian laba. Tugas lainnya adalah memahami seluruh aspek teknik pekerjaan dan berperan aktif membina sumber daya sesuai dengan kebutuhan proyek.

2 Menajer Teknik

Menajer Teknik bertugas menyusun/memelihara arsip, permintaan kerja, shop drawing, laporan harian, progress fisik, data pengukuran, dan gambar-gambar.
Memeriksa *Back Up Data Monthly Certificate*, CCO, dan addendum. Memeriksa dengan teliti setiap gambar-gambar kerja dan analisa konstruksi

3 Keuangan dan Administrasi

Tugas dari Keuangan dan Administrasi adalah mengelola pengalokasian uang, mencatat, memeriksa dan melaporkan semua transaksi yangberkaitan dengan keuangan kantor.

4 Petugas K3

Tugas dari petugas K3 adalah mengevaluasi program K3, dokumen kontrak, dan metode pelaksanaan konstruksi telah sesuai dengan peraturan K3 atau belum.

1.7 Ruang Lingkup

1.7.1 Tugas

Berdasarkan peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air daerah sesuai dengan kewenangannya.

1.7.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di pimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, bidang peralatan dan pengujian dan bidang penerangan jalan umum
b) Penyelanggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang peralatan, pengujian dan penerangan jalan umum
c) Pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina marga, bidang sumber daya air bidang peralatan, pengujian dan bidang penerangan jalan umum
d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.